

EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PEGADAIAN CABANG SETIA BUDI DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL

Egita Marlina¹, Erika Revida²

^{1,2}Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: egitamarlina1@gmail.com

ABSTRACT

KUR is a government program aimed at MSMEs which is distributed by financial institutions so that KUR can strengthen business capital and accelerate the development of the real sector and empower MSMEs. This is stated in the coordinating minister for the Economy of the Republic of Indonesia Decree Number 1 of 2022 concerning Guidelines for Implementing KUR. The aim of this research is to determine the effectiveness of the people's business credit (KUR) program in developing MSMEs at the Setia Budi branch of Pegadaian in Medan Sunggal District. This research uses effectiveness indicators according to Sutrisno (2007), namely program understanding, on target, on time, achieving program goals, and real change. The results of research on the Effectiveness of the People's Business Credit Program (KUR) in the Development of UMKM Pegadaian Setia Budi Branch show that the program has not been effective as expected. In business development, MSMEs also find it difficult to experience business development. MSMEs have not experienced significant development, some MSMEs have survived but have not experienced business development.

Keywords: Effectiveness; Program Effectiveness; People's Business Credit Program (KUR); Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

ABSTRAK

KUR merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk UMKM yang disalurkan oleh lembaga keuangan sehingga dengan adanya KUR dapat memperkuat permodalan usaha dan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Hal ini tercantum dalam Permenko Perekonomian RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program kredit usaha rakyat (KUR) dalam pengembangan UMKM Pegadaian cabang Setia Budi di Kecamatan Medan Sunggal. Penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007) yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program, dan perubahan nyata. Hasil dari penelitian Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Pengembangan UMKM Pegadaian Cabang Setia Budi menunjukkan bahwa program tersebut belum berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pengembangan usaha, UMKM juga sulit mengalami pengembangan usaha. UMKM belum mengalami pengembangan signifikan, sebagian UMKM tetap bertahan tetapi belum mengalami pengembangan usaha.

Kata kunci: Efektivitas; Efektivitas Program; Program Kredit Usaha Rakyat (KUR); Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor industri yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian baik di tingkat lokal maupun daerah. Upaya yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya pembangunan ekonomi yang maksimal bisa dilakukan melalui proses pengembangan pada sektor usaha (Halim, 2020:159). Dalam melakukan pengembangan sektor UMKM pada tanggal 04 Juli 2008 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 yang berisikan mengenai pemberlakuan atas usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Pemerintah RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007, Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Reformasi Sektor Keuangan. KUR merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong perbankan maupun non perbankan dalam menyalurkan kredit sebagai bentuk permodalan bagi UMKM terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Terdapat 5 jenis produk kredit usaha rakyat (kur) yang dapat diakses oleh usaha mikro kecil dan menengah dengan kisaran maksimal pinjaman yang berbeda. Terdapat 5 jenis kur yaitu kur super mikro, kur mikro, kur kecil, kur penempatan TKI, dan kur khusus. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terkhusus membahas mengenai kur super mikro. Kur super mikro merupakan KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp 10.000.000, - per penerima KUR.

Tabel 1:
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun Terakhir berdasarkan jenis Kredit Tahun 2022

No	Nama Kredit	Nilai/Persen
1	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	35,59
2	Kredit dari koperasi	19,46
3	Kredit dari bank umum*	15,15
4	Kredit perusahaan leasing	10,22
5	Kredit perorangan	6,2
6	Kredit dari BPR	4,95
7	Kredit pergadaian	3,63
8	Kredit KUB	1,02
9	Kredit dari BUMDes	0,82
10	Kredit jenis lain-lainnya	15,85

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Data diatas menjelaskan bahwa menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 ada 23,23% rumah tangga Indonesia yang menerima layanan keuangan berupa kredit. Secara nasional, layanan kredit yang paling banyak diambil kelompok konsumen rumah tangga adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan persentase 35,59%. Belakangan ini penyaluran KUR terus meningkat karena popularitas kur yang kuat di kalangan kelompok rumah tangga. Dari persentase data BPS diatas, provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 memberikan persentase penyaluran kur sebesar 33,32% yang didalamnya berasal dari rumah tangga perkotaan 27,79% dan rumah tangga pedesaan 39,65%.

Tabel 2:
Jumlah UMKM menurut Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No	Kota	Jumlah UMKM	Jumlah Usaha		
			Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Medan	314.944	225.674	11.725	77.545
2	Pematang Siantar	50.307	35.876	9.329	5.102
3	Sibolga	18.525	12.970	5.309	246
4	Tanjungbalai	26.395	17.876	6.792	1.727
5	Binjai	44.902	30.923	10.763	3.216
6	Tebing Tinggi	28.093	15.687	9.784	2.622
7	Padangsidempuan	27.055	22.744	2.421	1.890
8	Gunungsitoli	6.245	3.278	2.750	217

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 8 kota di Sumatera Utara dengan jumlah unit usaha yang berbeda. Kota Medan menduduki posisi pertama dengan Jumlah UMKM 314.944 unit usaha didalamnya mencakup 225.674 unit usaha mikro, 11.725 unit usaha kecil, dan 77.545 unit usaha menengah. Perolehan jumlah unit usaha Kota Medan yang lebih banyak dibandingkan Kota lain di Sumatera Utara dikarenakan faktor Kota Medan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Utara. Dengan tingginya angka tersebut membuktikan bahwa perkembangan UMKM di Kota Medan berkembang pesat, besarnya minat masyarakat dalam menjalankan usahanya. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Medan terus mendorong UMKM untuk dapat lebih maju dan semakin berkembang.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan Benny Iskandar Nasution menyebutkan, ekonomi Kota Medan stabil selama tahun 2022 ini. UMKM menjadi penopang perekonomian di Kota Medan pasca dilanda pandemi COVID-19. "Pondasi saat hancurnya ekonomi itu kan UMKM, Kota Medan (selama tahun 2022) alhamdulillah dengan adanya Bapak Wali Kota Medan stabil-stabil aja karena dengan dihidupkannya UMKM semakin kita jaga semakin stabil perekonomiannya," (diginomi.sumutprov.go.id). Berita lainnya menurut Fraksi Partai Gerindra, lanjutnya, ada enam permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM Kota Medan dalam mengembangkan dan memajukan usahanya. Yakni, kurangnya modal pemasaran dan pangsa pasar, kurangnya teknologi dan kemasan produk, kurangnya sumber daya manusia (SDM), akses kemitraan dan jaringan usaha, serta perizinan (mimbarumum.co.id).

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan Bank yang menyalurkan pembiayaan yaitu Kredit Usaha Rakyat yang ditujukan untuk UMKM Mikro dengan maksimal pinjaman Rp 10.000.000. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjalin kerja sama dengan PT Pegadaian untuk percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Kini Pegadaian secara resmi telah menjadi penyalur ke-44 dengan plafon KUR yang bisa disalurkan sebesar Rp 5,9 triliun.

Tabel 3:
Laporan Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat PT Pegadaian Cabang Setia Budi

Bulan	Realisasi KUR (Rupiah)	Rekening
Juni 2022	5.000.000	4
Juli 2022	27.000.000	5
Agustus 2022	139.000.000	18
September 2022	55.000.000	7
Oktober 2022	114.000.000	14
November 2022	152.000.000	20
Desember 2022	479.000.000	54
Januari 2023	-	0
Februari 2023	337.000.000	38
Maret 2023	481.000.000	58
April 2023	462.000.000	51
Mei 2023	726.000.000	77
Juni 2023	379.000.000	40
	3.356.000.000	386

Sumber: Pegadaian Cabang Setia Budi Tahun 2022-2023

Berdasarkan tabel 1.2 Laporan Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Pegadaian Cabang Setia Budi dapat diketahui bahwa realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus mengalami peningkatan setiap bulannya. Awal realisasi program pada bulan Juni 2022 penyaluran kredit usaha rakyat (kur) hanya dirasakan oleh 4 UMKM yang menjadi nasabah Pegadaian Setia Budi. Tetapi kini terjadi peningkatan terhadap jumlah UMKM yang mengambil kur super mikro di Pegadaian Setia Budi.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Hal ini menunjukkan perkembangan penyaluran KUR cukup berkembang dan diminati oleh para UMKM. Tetapi, kita juga harus melihat saat realisasi mengalami peningkatan maka harus diikuti dengan peningkatan pengembangan UMKM.

Berdasarkan observasi pra penelitian dengan melihat urgensi pelaksanaan program kredit usaha rakyat yang efektif cukup penting untuk pengembangan umkm, akan tetapi dalam pelaksanaan program kredit usaha rakyat di Pegadaian cabang Setia Budi masih ditemukannya beberapa permasalahan. Hal lainnya yang mendasari penelitian ini ialah, karena program ini baru terealisasi di Pegadaian maka di perlukan melihat keefektifan dalam jalannya program ini. Kecamatan Medan Sunggal merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pusat kota medan dengan letak yang strategis dalam pengembangan UMKM. Pemilihan ini dianggap tepat oleh peneliti karena produk kredit usaha rakyat (kur) yang disalurkan oleh Pegadaian adalah KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman sebesar Rp 10.000.000. Dalam hal penilaian efektifitas indikator yang menjadi pengukuran kredit usaha rakyat (kur) pada Pegadaian CP Setia Budi peneliti menggunakan 5 indikator menurut teori Sutrisno (2007) yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan program, dan perubahan nyata. Sehingga nantinya dapat diketahui hal apa saja yang menjadi kendala dalam realisasi program kredit usaha rakyat (kur) di Pegadaian CP Setia Budi baik dari sisi penyalur (Pegadaian CP Setia Budi) maupun pihak penerima (UMKM).

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dibuat peneliti diatas, maka peneliti tertarik untuk memberikan judul penelitian yang sesuai terhadap permasalahan yang dipaparkan yaitu efektivitas program kredit usaha rakyat (kur) dalam pengembangan UMKM Pegadaian cabang Setia Budi di Kecamatan Medan Sunggal.

METODE

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong,2017:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Peneliti memilih beberapa lokasi penelitian dalam melakukan pengumpulan data untuk melihat gambaran lebih mendalam mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Pada Pegadaian CP Setia Budi Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yaitu Pegadaian CP Setia Budi yang berlokasi di Jl. Setia Budi Komp. Ruko Milala Mas Blok B No. 04, Medan, Sumatera Utara. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah PT Pegadaian sebagai salah satu penyalur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro nonbank untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan lokasi UMKM-UMKM yang menjadi nasabah Pegadaian Cabang Setia Budi.

Dalam melakukan analisis data ini yaitu saat data yang dibutuhkan sudah didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles & Huberman yang meliputi beberapa tahapan yaitu reduksi data (b) penyajian data (c) kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Efektivitas menurut Sutrisno (2007:125-126) adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada efektivitas program kredit usaha rakyat dalam pengembangan UMKM Pegadaian cabang Setia Budi di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan menggunakan teori dari Sutrisno (2007) dalam mengukur efektivitas yang terdiri dari lima aspek sebagai berikut yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

A. Pemahaman Program

Dalam indikator pemahaman program peneliti akan melihat bagaimana program kredit usaha rakyat (kur) direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima serta dipahami oleh UMKM. Artinya, semakin paham sasaran program terhadap program kredit usaha rakyat maka semakin efektif program tersebut. Pemahaman Program yang berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui adanya program KUR di Pegadaian Cabang Setia Budi. Pemahaman program dapat diperoleh melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan Pegadaian CP Setia Budi untuk memperkenalkan produk KUR Pegadaian ke UMKM-UMKM di sekitar Pegadaian CP Setia Budi.

Pemahaman Pelaksana Program

Dalam menjalankan suatu program maka penyelenggara maupun pelaksana program harus memahami terlebih dahulu program yang dijalankan. Dalam hal ini agar pelaksanaan program kredit usaha rakyat (kur) dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan berjalan secara efektif wajib dimulai terlebih dahulu dari pihak pelaksana maupun penyelenggara program yaitu Pegadaian cabang Setia Budi. Peneliti mewawancarai keempat narasumber dan berdasarkan penjelasan dari keempat narasumber yang bertindak langsung dalam program KUR dapat diketahui bahwa program KUR sudah dapat dipahami dengan baik oleh pihak Pegadaian khususnya unit bisnis non gadai (mikro) yang menangani program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Melalui wawancara dapat diketahui Pegadaian cabang Setia Budi merupakan salah satu penyalur yang melaksanakan program KUR. Program KUR di Pegadaian sudah berjalan dalam waktu satu tahun terakhir tepatnya pada Juni 2022. Program KUR merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi UMKM. Melalui program KUR UMKM yang belum bankable dapat memperoleh pinjaman maksimal Rp 10.000.000, - dengan bunga 3% dalam satu tahun tanpa menggunakan agunan. Adanya program KUR ini tentu dapat menyelesaikan permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para UMKM menengah kebawah. Dengan modal usaha yang diterima diharapkan UMKM mengalami pengembangan usaha sehingga terjadi peningkatan pendapatan usaha karena modal merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha. KUR dengan mudah dapat diperoleh UMKM di Pegadaian cabang Setia Budi karena Pegadaian menjadi bagian dari pemerintah dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan juga bahwa pihak Pegadaian cabang Setia Budi sudah melakukan tugas mereka sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. contohnya saja saat peneliti ikut survey ke lapangan dengan BPO KUR, BPO KUR melakukan kegiatan canvassing ke pasar tradisional karena pasar tradisional di dominasi oleh UMKM. Lebih lanjut terkait dengan tugas yang telah ditetapkan sebelum melakukan kegiatan turun ke lapangan dilakukan briefing agar memberikan semangat serta penekanan tugas dari pihak Pegadaian yaitu memastikan program KUR disalurkan dengan baik kepada UMKM.

Sosialisasi program

Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program. Meskipun terlihat sepele dan ringan, namun proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Sehingga pegawai Pegadaian harus sangat berhati-hati dalam proses sosialisasi, mengingat kondisi UMKM yang sangat heterogen, baik tingkat pendidikan, karakter, daya terima dan pemahaman UMKM terhadap program kredit usaha rakyat (kur). Kegiatan sosialisasi menjadi unsur yang memiliki peranan penting untuk dilakukan oleh pihak penyelenggara program khususnya dalam hal ini adalah pihak Pegadaian cabang Setia Budi untuk dapat memperkenalkan program kredit usaha rakyat (kur) kepada UMKM serta mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam mengetahui sosialisasi yang terjadi dilapangan, peneliti juga mewawancarai UMKM-UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan melalui Pegadaian cabang Setia Budi untuk memastikan sosialisasi program yang dilakukan. Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada UMKM yang menerima pembiayaan KUR melalui Pegadaian cabang Setia Budi dapat diketahui

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



bahwa Pegadaian cabang Setia Budi telah melakukan sosialisasi program dan bentuk canvassing baik dilakukan di luar kantor cabang maupun di dalam kantor cabang kepada nasabah-nasabah yang datang ke Pegadaian cabang Setia Budi. Pernyataan ini tentu menguatkan pernyataan yang di dapatkan melalui para pegawai Pegadaian cabang Setia Budi bahwa mereka melakukan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan program KUR kepada para pemilik usaha dengan tujuan menambah nasabah yang menerima pembiayaan KUR di Pegadaian cabang Setia Budi.

Pemahaman UMKM Terhadap Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penerima program haruslah memahami program yang dijalankan maka dari itu tentunya sangatlah penting karena keberhasilan program juga dilihat dari sisi pemahaman penerima program. Suatu program yang berjalan pastinya akan diberikan kepada pihak penerima sehingga pihak penerima wajib mengerti betul program yang diberikan untuk menghindari terjadinya program yang salah sasaran atau bahkan program dianggap tidak sesuai kebutuhan, sehingga penerima program harus memahami program dengan baik yang pada akhirnya program tersebut mampu berjalan sesuai dengan perencanaan.

Melalui wawancara dengan UMKM sebagai penerima program KUR di Pegadaian cabang Setia Budi dapat diketahui bahwa UMKM Pegadaian cabang Setia Budi belum dapat memahami dengan baik tentang tujuan adanya program KUR. Hal ini dikarenakan saat kegiatan sosialisasi atau canvassing dilakukan oleh pihak pegawai, mereka hanya menjelaskan mengenai persyaratan dan jumlah pinjaman yang dapat diperoleh tetapi tidak menjelaskan secara mendalam mengenai tujuan maupun manfaat KUR yang akan diterima oleh UMKM. Sehingga tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya tercapai. Hasil yang dicapai adalah penambahan nasabah yang mengambil KUR di Pegadaian cabang Setia Budi tetapi tanpa diikuti pemahaman program KUR secara rinci dan jelas.

Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pemahaman program masih ditemukan permasalahan dimana fakta dilapangan menunjukkan bahwa UMKM Pegadaian cabang Setia Budi belum memahami secara mendalam terkait program sehingga membuat program kredit usaha rakyat (kur) sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Serta tujuan dari adanya proses sosialisasi tersebut tidak sepenuhnya tercapai. Karena sebagian besar UMKM hanya diberitahu oleh pihak Pegadaian cabang Setia Budi tentang persyaratan maupun kriteria penerima kredit usaha rakyat (kur) saja bukan memberikan sosialisasi secara rinci kepada UMKM. Dalam melakukan sosialisasi program kredit usaha rakyat (kur) ini terdapat beberapa yang perlu diperhatikan yaitu tidak hanya pengetahuan nasabah tentang prosedur KUR tetapi juga pengetahuan nasabah tentang program KUR. Dengan demikian, program KUR di Pegadaian cabang Setia Budi belum dapat memenuhi indikator pemahaman program.

B. Tepat sasaran

Dalam mencapai efektivitas yang tinggi, program KUR pada Pegadaian Cabang Setia Budi harus berfokus pada sasaran yang tepat yaitu UMKM yang membutuhkan bantuan atau manfaat program KUR secara nyata. Maka dari itu, dalam penelitian yang dilakukan peneliti akan melihat apakah program KUR yang disalurkan pada Pegadaian CP Setia Budi memenuhi indikator tepat sasaran atau tidak. Identifikasi kelompok sasaran yang tepat akan membantu program KUR dalam merancang strategi yang sesuai dan memastikan bahwa upaya program secara langsung relevan dan bermanfaat bagi UMKM yang menerima.

Program kredit usaha rakyat (kur) memberikan manfaat bagi UMKM Pegadaian cabang Setia Budi

Program KUR sendiri ditujukan kepada UMKM yang membutuhkan pembiayaan atau permodalan sehingga dapat mengembangkan usahanya. Bagi pemerintah kehadiran UMKM memberikan pengembangan pada sektor riil sebagai bentuk untuk menanggulangi kemiskinan dan kesempatan kerja di Indonesia. Berdasarkan wawancara-wawancara yang dilakukan peneliti dijelaskan bahwa adanya program KUR sangat membantu para pelaku usaha atau UMKM dalam masalah permodalan. Melalui wawancara yang dilakukan juga para staff sepakat mengatakan yang berhak untuk

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



mendapatkan KUR di Pegadaian ialah pemilik usaha atau UMKM. Namun, meskipun mendapatkan antusiasme yang positif bagi UMKM di cabang Setia Budi dengan jumlah kenaikan realisasi program KUR setiap bulannya diketahui pula bahwa belum semua penerima program KUR di Pegadaian cabang Setia Budi adalah pelaku usaha/UMKM.

Kelompok sasaran program kredit usaha rakyat (kur)

Dalam program kredit usaha rakyat (kur) kelompok sasaran menjadi tujuan program yang dilaksanakan oleh pelaksana program yaitu Pegadaian cabang Setia Budi. Maka dari itu, dalam menentukan kelompok sasaran diperlukan kejelasan agar tidak menyebabkan terjadinya program yang salah sasaran dan haruslah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Wawancara yang dilakukan menghasilkan informasi mengenai UMKM yang berhak menerima KUR super mikro Pegadaian wajib menjalankan usaha minimal satu tahun berjalan jika usaha tersebut belum satu tahun berjalan wajib mengikuti pelatihan UMKM yang diadakan oleh pihak Pegadaian. Jumlah pinjaman KUR sendiri akan dilihat melalui repayment capacity. Penilaian kemampuan membayar ini penting untuk memastikan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tanpa terlalu banyak beban keuangan sehingga mengurangi kredit macet. Akan tetapi fakta dilapangan peneliti menemukan bahwa Program KUR yang dilaksanakan oleh Pegadaian cabang Setia Budi belum sepenuhnya tepat sasaran.

Bersarkan ketetapan sasaran program KUR di Pegadaian cabang Setia Budi dalam menyalurkan KUR masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dalam menentukan kelompok sasaran program. Tentunya hal ini menunjukkan bahwasanya belum semua yang mendapatkan KUR di Pegadaian cabang Setia Budi adalah kelompok sasaran program yaitu UMKM. Selain itu, belum semua UMKM mengetahui terkait kelompok sasaran program KUR dengan benar sehingga masih ditemukan penyalahgunaan kepemilikan usaha. Sementara dari hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan, penyaluran KUR banyak dinikmati justru bukan oleh pelaku usaha kecil. Penyaluran KUR banyak diserap bukan untuk membiayai sektor usaha produktif. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwasanya aspek tepat sasaran belum dapat dikatakan efektif.

C. Tepat waktu

Tepat waktu berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh penyalur/Pegadaian dalam mencairkan dana ke UMKM yang dikategorikan dapat menerima KUR Super Mikro. Dalam rangka mencapai efektivitas program KUR, penting untuk menjaga kesadaran dan fokus terhadap aspek tepat waktu. Dengan memastikan bahwa program berjalan sesuai jadwal, mengelola waktu dengan efisien, menghormati tenggat waktu yang telah ditetapkan, beradaptasi dengan perubahan waktu, dan mengevaluasi penggunaan waktu, program dapat meningkatkan kemampuan Pegadaian untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efektif.

Dalam penelitian ini indikator tepat waktu dalam Efektivitas Program KUR di Pegadaian cabang Setia Budi dapat dikatakan sudah tercapai dan memenuhi indikator tersebut sehingga UMKM dapat memperoleh permodalan KUR yang bersumber dari Pegadaian cabang Setia Budi dengan cepat. Selain itu, belum ditemukannya permasalahan yang serius dalam indikator tepat waktu yang di jalankan oleh Pegadaian cabang Setia Budi. Permasalahan-permasalahan kecil seperti gangguan sistem jaringan atau persyaratan dokumen yang belum lengkap dapat langsung dengan cepat di selesaikan tanpa menghambat proses pencairan akad kredit yang di lakukan. Hal ini membuktikan bahwasannya pelayanan nasabah KUR sudah berjalan sesuai dengan rencana dan waktu yang ditetapkan.

D. Tercapainya tujuan program

Dalam program KUR Super Mikro tujuan adanya program tersebut menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif
- 2) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
- 4) Peningkatan pendapatan

Dalam wawancara mengenai KUR yang diberikan oleh Pegadaian kepada UMKM telah memberikan manfaat kepada UMKM sebagai upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM. Program KUR di Pegadaian cabang Setia Budi telah berjalan dalam mengembangkan UMKM. Selain itu, Tujuan program KUR di Pegadaian telah terlaksana dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha sektor UMKM serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat mulai dari pengembangan perekonomian UMKM dan peningkatan pendapatan sebagai upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dengan bunga pinjaman yang diberikan tidak memberatkan para nasabah pengguna KUR Pegadaian.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan UMKM untuk mengetahui fakta dilapangan mengenai kondisi UMKM dalam mencapai tujuan program KUR. Dalam wawancara tersebut diketahui bahwa tidak ada pengembangan usaha yang dilakukan oleh UMKM. Belum tercapainya tujuan program KUR di Pegadaian bagi beberapa UMKM di Pegadaian dikarenakan terdapat perbedaan cara dalam mengelola dana KUR yang diberikan oleh pihak Pegadaian cabang Setia Budi. Berdasarkan Ibu Dewi Handayani menggunakan modal KUR bukan untuk pengembangan usaha melainkan digunakan untuk keperluan lainnya. Kemudian, dalam wawancara dengan Bapak Fachri yang menjalankan usaha dagang ayam potong terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana KUR oleh UMKM. Oleh karena itu, Bapak Fachri memutuskan melakukan penutupan usaha terhitung sejak Juni 2023. Dalam permasalahan yang dihadapi Bapak Fachri terjadi kesalahan strategi dalam melakukan pengelolaan usaha. Usaha tidak mengalami pengembangan melainkan kerugian yang menyebabkan penutupan usaha. Selain itu, dalam wawancara dapat diketahui bahwa masih banyak ditemui penunggakan yang dilakukan oleh nasabah KUR di Pegadaian. Penunggakan KUR yang dilakukan nasabah dikarenakan kurangnya daya beli di usaha yang dijalankan UMKM.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan mengenai tujuan program KUR diketahui bahwa program KUR di Pegadaian cabang Setia Budi belum dapat memenuhi indikator tercapainya tujuan dalam menilai efektivitas suatu program. Program KUR di Pegadaian cabang Setia Budi hanya mampu menyelesaikan masalah permodalan yang dihadapi pelaku UMKM tanpa diikuti dengan pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan. Faktor seperti kurang tepatnya sasaran program, persaingan pasar menjadi penyebab utama program KUR di Pegadaian cabang Setia Budi belum dapat mencapai tujuan program. Tidak hanya itu saja, masih ditemui UMKM yang mengalami penunggakan kredit dikarenakan penggunaan dana KUR tidak dipergunakan dalam pengembangan usaha. Selain itu, UMKM Pegadaian cabang Setia Budi belum mengalami kenaikan pendapatan setelah memperoleh bantuan permodalan dari Pegadaian.

E. Perubahan nyata

Pelaksanaan program KUR di Pegadaian cabang Setia Budi sesuai dengan konsep efektivitas indikator perubahan nyata pasti mengharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik kepada UMKM Pegadaian cabang Setia Budi baik dari segi perekonomian, pengurangan angka pengangguran, maupun tingkat kesejahteraan UMKM. Tetapi, fakta dilapangan melalui wawancara dengan UMKM perubahan nyata belum dirasakan oleh UMKM. Diketahui bahwa, KUR Pegadaian cabang Setia Budi belum mampu meningkatkan taraf kehidupan maupun perekonomian UMKM baik itu penambahan pendapatan, penambahan tenaga kerja, serta kualitas kehidupan nasabah. Pihak Pegadaian cabang Setia Budi juga menyatakan hal serupa bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir sejak KUR resmi disalurkan oleh Pegadaian, program KUR belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap UMKM. walaupun demikian, pihak Pegadaian cabang Setia Budi tetap melakukan pemantauan usaha agar penggunaan modal dapat memberikan perubahan signifikan kepada usaha UMKM maupun taraf kehidupan UMKM.

Program KUR di Pegadaian cabang Setia Budi belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap usaha nasabah sesuai dengan tujuan KUR itu sendiri. Artinya, program KUR di Pegadaian

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



cabang Setia Budi belum mampu memenuhi indikator perubahan nyata. Program KUR adalah program yang ditunggu serta diharapkan oleh para pelaku usaha yang kesulitan dalam masalah permodalan. Dengan persyaratan dan suku bunga yang rendah pemerintah membuat program ini agar dapat dijangkau oleh para pelaku usaha atau UMKM. Tujuan program juga tercantum dengan jelas dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu terpusat pada pengembangan usaha diikuti dengan peningkatan taraf hidup para pelaku usaha. Oleh karena itu, pihak Pegadaian sebaiknya melakukan monitoring atau pengawasan lebih ketat terhadap program KUR agar tidak dimanfaatkan oleh UMKM untuk keperluan pribadi maupun lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul efektivitas program kredit usaha rakyat dalam pengembangan UMKM Pegadaian cabang Setia Budi di Kecamatan Medan Sunggal berdasarkan teori Sutrisno (2007) diketahui bahwa program tersebut belum berjalan efektif sesuai dengan pencapaian tujuan program yaitu pengembangan UMKM Pegadaian cabang Setia Budi. Dari beberapa UMKM yang dipilih dalam penelitian ini hanya satu dari UMKM yang melakukan pengembangan usaha dilihat dari terjadinya peningkatan pendapatan dan perluasan usaha yang akan direncanakan dalam waktu dekat. UMKM lainnya belum mengalami pengembangan signifikan, sebagian UMKM tetap bertahan tetapi belum mengalami pengembangan usaha. Tidak hanya itu, ditemui usaha UMKM yang sudah tidak berjalan setelah memperoleh KUR dikarenakan kesalahan dalam perencanaan strategi pengembangan usaha. UMKM Pegadaian cabang Setia Budi juga belum dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat lainnya karena pengembangan usaha belum terjadi sesuai dengan harapan dan tujuan program KUR. Kedepannya diharapkan bahwa program KUR membawa perubahan signifikan bagi kelangsungan usaha-usaha kecil dan mikro serta membawa manfaat bagi masyarakat.

Diharapkan kedepannya pelatihan dan pengembangan kepada UMKM yang menerima program KUR harus dilakukan dengan kerja sama langsung bersama pihak Pegadaian. Diharapkan kedepannya dana KUR Pegadaian cabang Setia Budi dapat memberikan peluang serta kesempatan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan inovasi maupun kreatifitas sehingga usaha tersebut terus berkembang. Karena sepanjang KUR digunakan untuk pengembangan usaha maka usaha tersebut akan berkembang. Pemerintah bersama pihak Pegadaian cabang Setia Budi sendiri harus meningkatkan pendampingan dan evaluasi sehingga tujuan program KUR dapat tercapai.

REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
- Badan Pusat Statistik (2022). Persentase Rumah Tangga yang Menrima Kredit dalam Setahun Terakhir berdasarkan jenis kredit Tahun 2022, dalam <https://www.bps.go.id/publication/2023/04/17/65695a2b5a039c58071d23b6/indikator-pekerjaan-layak-di-indonesia-2022.html> diakses pada 14 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB.
- <https://mimbarumum.co.id/fraksi-partai-gerindra-ada-6-permasalahan-dihadapi-pelaku-umkm-di-kota-medan/> diakses pada 20 Juni 2023 pukul 11.25 WIB.
- <https://diginomi.sumutprov.go.id/2023/01/03/ditopang-umkm-ekonomi-kota-medan-stabil-sepanjang-2022/> diakses pada 20 Juni 2023 pukul 11.30 WIB.
- <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/392/pegadaian-launching-kur-syariah-super-mikro> diakses pada 20 Juni 2023 pukul 11.35 WIB.
- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20542> diakses pada 22 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.
- <https://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur> diakses pada 22 Juni 2023 Pukul 11.00 WIB.
- <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6721/porsi-kredit-diperbesar-segera-naik-kelas?lang=1> diakses pada 14 Juli 2023 Pukul 09.50 WIB.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



301

SINTA 5

PKP|INDEX



- <https://data.pemkomedan.go.id/dataset> diakses pada 15 November 2023 pukul 15.00 WIB.
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2007, Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Reformasi Sektor Keuangan.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudassir, A, Saleh, (2020). Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa*, journal.unismuh.ac.id, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3683>
- Pandipa, AKHS (2020). Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mngembangkan Usaha Kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Mapane. *Jurnal Ilmiah Administratie*, ojs.unsimar.ac.id, <https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/administratie/article/view/204>
- Peraturan Dikresi nomor 32 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang
- Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI no 1 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
- Peraturan Menteri Perekonomian RI nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Safitri, H, & Setiaji, K (2018). Pengaruh modal usaha dan karakteristik wirausaha terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil di Desa Kedungleper Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. *Economic Education Analysis Journal*, journal.unnes.ac.id, <<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/28291>>
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.CV.
- Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syamsudin, Tulus, Yolanda (2022). Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Pemberdayaan Nelayan Melalui Kegiatan Pengadaan Alat Tangkap. *Jurnal Administrasi Publik*. ejournal.unsrat.ac.id, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/40087/35982>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id